

Penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Pasangkayu

Andi Yuniarti Hamzah,¹ Asrifai,^{2*} Muh Rapi^{3*}

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; yuniartihamzah12@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia;

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia;

* Correspondence :

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Electronic Government, Information Communication Agency for Coding and Statistics, Pasangkayu.*

Received. : 25 Juli

Revised. : 29 Juli

Accepted : 9 Agustus

ABSTRAK

Umumnya komunikasi antar institusi sosial maupun pemerintah di kantor-kantor pemerintahan berlangsung konvensional dengan cara tatap muka. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi juga turut membawa inovasi dengan lahirnya *Electronic Government* atau pemerintahan elektronik, dengan harapan membuka peluang baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, transparan, serta tanpa harus bertatap muka. Hal itulah menjadi momok hampir diseluruh daerah yang ada di Indonesia, tidak terlepas Kabupaten Pasangkayu. Atas dasar itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Electronic Government (e-Gov)* di Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Pasangkayu. Penelitian dan penulisan ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Konsep yang diterapkan ialah mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Sharon tentang *e-Gov*, yaitu memuat aspek *Strategy, Policy, Data, Cost Factory, Skills, Technology*. Adapun jenis datanya berupa data primer dan sekunder. Kemudian berkaitan dengan teknik yang digunakan adalah selaras dengan kebutuhan jenis data. Hasil penelitian ini adalah mengidentifikasi penerapan *e-Gov* di Diskominfoers Kabupaten Pasangkayu berdasarkan aspek teori oleh Sharon. Mulai dari *Strategy*, berupa sosialisasi terhadap masyarakat hingga memaksimalkan sinergitas antar OPD agar terciptanya *e-Gov. Policy*, mengacu pada Inpres hingga turunannya yang direalisasikan dalam Renstra (Rencana Strategis) sehingga alur dari Diskominfoers lebih jelas. *Data*, bersinggungan dengan informasi yang diberikan dan dapat diakses pada *website*. *Cost Factory*, Diskominfoers memiliki Rencana Strategis yang didalamnya secara eksplisit peruntukannya bertujuan untuk pengembangan mulai dari unsur SDM hingga produk yang menunjang teknologi informasi. *Skills*, pelatihan berupa BIMTEK dan edukasi bagi staff. *Technology*, adanya dukungan jaringan yang sifatnya publik (*wifi*) dan secara mandiri dengan memanfaatkan jaringan internet lokal.

ABSTRACT

Generally, communication between social institutions and the government in government offices takes place conventionally, face to face. As time goes by and advances in technology also bring innovation with the birth of *Electronic Government*, with the hope of opening up new opportunities to improve the quality of public information services that are effective and efficient, transparent, and without having to meet face to face. This has become a scourge in almost all regions in Indonesia, including Pasangkayu Regency. On this basis, this research aims to determine the implementation of *Electronic Government (e-Gov)* in the Coding Information Communication and Statistics Service of Pasangkayu Regency.

This research and writing uses a qualitative descriptive type. The concept applied refers to the theory put forward by Sharon regarding e-Gov, namely containing aspects of Strategy, Policy, Data, Cost Factory, Skills, Technology. The types of data are primary and secondary data. Then the technique used is in line with the needs of the type of data. The result of this research is to identify the application of e-Gov in the Diskominfopers of Pasangkayu Regency based on theoretical aspects by Sharon. Starting from Strategy, in the form of outreach to the community to maximizing synergy between OPDs to create e-Gov. Policy, refers to the Presidential Instruction and its derivatives which are realized in the Strategic Plan (Renstra) so that the flow of Diskominfopers is clearer. Data, relates to the information provided and can be accessed on the website. Cost Factory, Diskominfopers has a Strategic Plan which explicitly aims to develop everything from HR elements to products that support information technology. Skills, training in the form of BIMTEK and education for staff. Technology, there is public network support (wifi) and independently by utilizing the local internet network.

Pendahuluan

Dalam menghadapi tantangan di era globalisasi ini pemerintah Republik Indonesia telah membuat kebijakan pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun *Electronic Government for a Good Governance* yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pelosok daerah dengan tujuan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan dibangun dapat dimanfaatkan secara bersama guna komunikasi maupun koordinasi antar institusi sosial dan pemerintah hingga dalam lingkup pemerintahan. Sehubungan dengan hal itu tentu menjadi sebuah urgensi bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan daerahnya untuk menjunjung dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu upayanya adalah menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang umum disebut dengan *e-Gov*.

Menurut Kominfo pada dasarnya *Electronic Government* adalah penerapan produk-produk Teknologi informasi dan Komunikasi yang digunakan untuk mendukung administrasi pemerintahan. *Electronic Government* berasal dari bahasa inggris yang berarti pemerintahan elektronik. *Electronic Government* biasa juga disebut *e-Gov*, *Digital Government*, *Online Government* atau dalam konteks tertentu yaitu *Transformational Government*. *Electronic Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi

warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *Electronic Government* dapat diaplikasikan pada Legislatif, Yudikatif atau Administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. *Electronic Government* merupakan pengguna teknologi oleh pemerintah khususnya pengguna aplikasi berbasis web untuk meningkatkan akses dan pemberian layanan pemerintah kepada warga negara, mitra bisnis, pegawai atau karyawan dan badan pemerintah lainnya (James S.L. Yong, 2003). Ada tiga kesamaan karakteristik dari tiap-tiap definisi *e-Gov* (Indrajit, 2006), yaitu: (a) Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*). (b) Melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet. (c) Memperbaiki mutu atau kualitas dibidang pelayanan.

Perkembangan *e-Gov* dapat ditinjau dari beberapa tahap evolusi, yaitu dimulai dengan kehadiran pemerintah dalam bentuk *web* yang menyediakan informasi dasar dan relevan untuk publik (Layne dan Lee dalam Nugraha, 2021). Terdapat pula pengertian yang didasarkan pada tingkatan atau tahapan dalam pengembangan *e-Gov*. (Agarwal dalam Ali, 2012) membagi pengertian *Electronic Government* ke dalam lima tingkatan, yang semakin tinggi tingkatannya maka semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi, antara lain: (a) Tingkatan yang paling awal adalah apa yang disebut *Electronic Government* untuk menunjukkan wajah pemerintahan yang baik dan menyembunyikan kompleksitas yang ada di dalamnya. (b) Tingkat kedua dari *Electronic Government*, mulai ditandai dengan adanya interaksi dan transaksi secara *online/daring* antara suatu institusi pemerintah dan masyarakat. (c) Level ketiga dari *Electronic Government* memerlukan kerja sama secara *online/daring* antar beberapa institusi dan masyarakat. (d) Level keempat dari *Electronic Government* sudah semakin kompleks. Bukan hanya memerlukan Kerjasama antar institusi dan masyarakat, tetapi juga menyangkut arsitektur teknis menjadi semakin kompleks. (e) Level kelima, pemerintah sudah memberikan informasi yang terpaket sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sudah bisa memberikan apa yang disebut dengan “*Information-Push*” yang berorientasi kepada masyarakat. Masyarakat benar-benar seperti raja yang dilayani oleh pemerintah.

Sejak adanya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Gov* membuat berbagai Instansi Pemerintahan termasuk pemerintah daerah di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Pasangkayu mulai mengembangkan dan menerapkan *e-Gov* dengan berbagai metode serta tahapannya. Pasangkayu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di kecamatan Pasangkayu. Perkembangan *e-Gov* di Kabupaten Pasangkayu masih tergolong baru dan saat ini masih berorientasi di Diskominfo yang ditandai dengan adanya situs *web* Diskominfo Kabupaten Pasangkayu dan dapat diakses melalui domain pasangkayukab.go.id.

Adapun saat ini asumsi dan penelusuran awal di situs *web* Diskominfo tidak terdapat visi misi pada halaman beranda, sehingga untuk mengetahui terkait strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh dinas tentu dianggap kurang informatif. Selanjutnya hal-hal berkaitan dengan langkah strategis dapat ditemukan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra), secara singkat didalamnya juga telah mengatur alur strategi dan kebijakan yang nantinya menjadi landasan bagi penerapan *e-Gov*. Bersamaan dengan hal tersebut, tentu dapat menjadi jawaban terkait kelemahan dari penerapan *e-Gov* yang ada saat ini sehubungan dengan yang telah ditemukan pada observasi awal hingga adanya permasalahan seperti kualitas sumber daya manusia, masalah penganggaran, dukungan dari segi infrastruktur, standarisasi sistem yang menjadi acuan, serta sinergitas dalam pemerintahan yang masih perlu dibenahi. Atas dasar itulah kemudian penelitian terkait Penerapan *Electronic Government* dalam suatu institusi perlu diperhatikan. Mengingat pelaksanaan *e-Gov* dapat dikatakan optimal apabila memenuhi 6 aspek yang terdapat dalam Teori Implementasinya (Sharon S. Dawes, 2008), yakni antara lain: strategi, kebijakan, data, keterampilan,

biaya yang dikeluarkan dan teknologi. Dalam beberapa topik penelitian yang telah dilakukan sebagian besar dilaksanakan pada institusi yang memiliki pengalaman lebih jauh dalam pengelolaan pemerintahan. Hal inilah yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Pasangkayu. Sebab dalam perjalanannya institusi atau Kabupaten Pasangkayu masih terbilang muda.

Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Pasangkayu menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara terperinci, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan informasi-informasi yang terjadi saat ini dan melihat kaitannya dengan aspek-aspek yang ada. Dimana penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan apa adanya informasi yang didapatkan sesuai dengan aspek-aspek yang diteliti oleh karena itu untuk memberikan fokus serta arah pada penelitian maka konsep yang digunakan dan dikembangkan yaitu menggunakan konsep dan teori dari Sharon S. Dawes (2008) yang kiranya relevan untuk menjelaskan terkait bagaimana penerapan *Electronic Government* di Diskominfo Kabupaten Pasangkayu. Aspek-aspek dalam teori ini yang digunakan yaitu strategi dimana dalam penelitian ini berorientasi pada sasaran yang hendak dicapai oleh Diskominfo guna memaksimalkan alur kinerja, kebijakan dimana memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman atau landasan bagi Diskominfo dalam pengambilan keputusan, data dimana berupa informasi yang diterbitkan baik secara daring maupun luring yang publikasinya dalam ranah wewenang Diskominfo, biaya dimana yang kemudian masuk dalam penganggaran sehingga didalamnya memuat beragam target baik secara operasional untuk fisik maupun non

fisik, keterampilan ditujukan bagi pengguna/*user* di Diskominfoopers berkaitan dengan SDM dalam manajemen pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi berhubungan dengan sejauh mana perkembangan teknologi yang telah diterapkan pada saat ini.

Pada penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan terdiri atas dua yaitu data primer dan data sekunder yang dimana keduanya diperoleh dengan menghubungkan fakta, data dan informasi langsung dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian yang juga dipadukan dari literasi studi pustaka, dimana data primer didapatkan melalui wawancara mendalam secara langsung dengan informan yang telah diolah secara mandiri sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen, data dari buku, jurnal serta aturan-aturan dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini diambil dengan pertimbangan dimana memilih orang-orang yang memahami dan berhubungan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2008). Pada penelitian ini yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri yang dimana mengumpulkan, mendengar dan mengambil data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian dibantu dengan peralatan dan perlengkapan yang digunakan saat proses observasi dan wawancara.

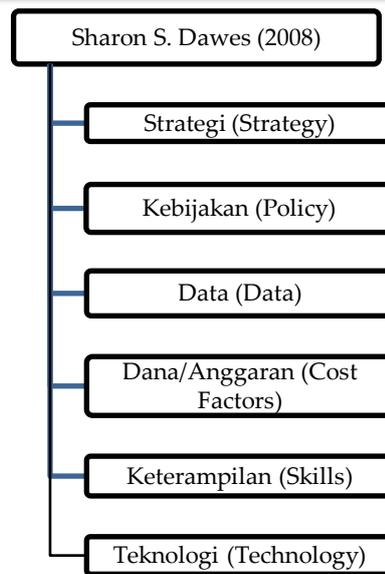
Dalam penelitian ini data-data yang terkumpul dari proses observasi dan wawancara dianalisis secara khusus untuk mendapatkan kesimpulan secara umum yang kemudian dirangkum secara deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman dengan pengumpulan data yang didapatkan pada saat proses observasi dan wawancara kemudian data yang telah terkumpul diuraikan lalu dilakukan penyederhanaan dan pemilihan data lalu setelah melewati kondensasi data kemudian menyajikan data dengan guna untuk mempermudah menentukan tindakan yang selanjutnya akan dilakukan, setelah melakukan beberapa tahapan tersebut dilakukan penarikan kesimpulan dari analisis

yang telah dilakukan serta pengecekan kembali dengan data yang ditemukan di lapangan (Miles, Huberman dan Saldana, 2014).

Lokasi pada penelitian ini berada di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Pasangkayu. Alasan mendasar dipilihnya lokasi penelitian ini karena penerapan *Electronic Government* pada Kabupaten Pasangkayu masih terbilang cukup baru dan menjadi tantangan dikarenakan kabupaten ini secara administratif masih terbilang muda sehingga dalam penerapan *Electronic Government* perlu dilakukan dari awal dengan berbagai tahapan sesuai ketentuan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional. Adapun alasan lainnya karena belum adanya penelitian serupa khususnya mengenai penerapan *Electronic Government* di Diskominfo pers Kabupaten Pasangkayu dan lokasi penelitian tersebut mudah untuk dijangkau sehingga memudahkan peneliti dalam proses pengambilan data-data.

Hasil dan Pembahasan

Secara teoritif dalam penerapan *e-Gov*, ada banyak kajian yang oleh para ahli dibidang ini perlu dipertimbangkan, namun dapat secara maksimal apabila menerapkan prinsip yang dikemukakan oleh Sharon S. Dawes yang dikombinasikan dalam 6 bagian secara garis besar, yaitu:



Gambar. Bagan aspek teori *e-Gov*

Sumber: Sharon S. Dawes (2008)

1. Strategi Penerapan *e-Gov* di Diskominfoopers

Berkaitan dengan upaya dalam menerapkan *e-Gov* tentu dibutuhkan strategi-strategi krusial yang dapat dijadikan acuan, dengan pertimbangan tersebut maka diterbitkannya dokumen pendukung dalam bentuk rencana strategis (Renstra tahun 2021 – 2026) yang didalamnya berisi tentang alur berupa sasaran yang hendak dicapai. Secara garis besar membahas tentang optimalisasi jaringan lokal pemda serta pelayanan publik, peningkatan kualitas serta kuantitas sarana prasarana, dan peningkatan kualitas SDM, hingga terintegrasinya pelayanan serta pengembangan inovasi daerah.

Adapun terkait penerapan secara teknis didasarkan pada hasil wawancara bersama beberapa informan selaku pelaksana yang ada di Diskominfoopers. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa upaya yang tengah dilakukan ialah dengan melakukan *focus group discussion* (FGD) dengan memperkenalkan gagasan-gagasan mengenai *e-Gov* kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pasangkayu serta dengan membangun sinergitas didalamnya agar dalam pengembangan *e-Gov* senantiasa tetap terpelihara. Kemudian juga dilakukannya sosialisasi yang diinisiasi oleh pemda kepada masyarakat dengan memperkenalkan

Diskominfoopers beserta beberapa program awal yang sudah dilakukan seperti konektivitas antar OPD dan pelayanan yang sudah dapat dilakukan secara *online*. Se jauh ini dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan *e-Gov* hingga pada penerapannya dapat dikatakan bahwa Diskominfoopers belum dapat bergerak secara mandiri, karena dapat dipahami bahwa hal ini berkaitan dengan belum direalisasikannya kebijakan berupa peraturan daerah (Perda) yang dapat dijadikan landasan dalam menjalankan kepentingan dari Diskominfoopers.

Dengan pertimbangan adanya kesadaran dari Diskominfoopers bahwa langkah dalam memulai pemerintahan berbasis elektronik tentunya tidak dapat dilaksanakan secara individu namun perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Mengingat, menurut peneliti saat ini konsep *Electronic Government* merupakan hal yang baru. Walaupun secara definisi Diskominfoopers lebih memahami arti dari konsep tersebut akan tetapi secara praktik mereka belum dapat bergerak sendirian, hal ini terlihat pada pembuatan layanan akses informasi berupa *website* masih mengatasnamakan pemerintah daerah yang dikelola oleh Diskominfoopers. Selain itu adapun beberapa yang masih perlu dimaksimalkan adalah terkait layanan informasi tentunya secara mandiri dari berbagai OPD harus memiliki layanan masing-masing, sehingga dalam pelayanan terhadap masyarakat tentunya dikembalikan pada masing-masing OPD tersebut. Oleh karena itu nantinya keberadaan dari Diskominfoopers dalam penerapan *e-Gov* hanya sebatas pengawasan hal ini mempertegas bahwa esensi dari Diskominfoopers adalah sebagai instrumen dalam mengelola keseluruhan yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi.

2. Kebijakan Penerapan *e-Gov* Diskominfoopers

Berdasarkan penjelasan pada poin sebelumnya bahwa telah dijelaskan berdasarkan asumsi awal dan hasil penelusuran terkait landasan hukum yang menjadi kebijakan dalam penerapan *e-Gov* memang belum tersedia. Hal ini pula telah dipertegas oleh pendapat dari informan di Diskominfoopers yang menegaskan bahwa terkait dengan kebijakan sejauh ini memang masih dalam penyusunan. Hal ini tentu

menjadi kendala karena dalam hal penerapan dapat diasumsikan belum menjadi prioritas. Selain itu yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program-program hingga kebijakan awal yang nantinya dapat menjadi pertimbangan agar dapat dijadikan landasan yang tertuang dalam peraturan daerah (Perda) adalah mengacu pada Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003, dan peraturan perundangan yang bersinggungan dengan hal ini maka dapat ditemukan dalam visi dan misi Diskominfoopers. Adapun arah kebijakan lain yang telah dibuat dalam mengembangkan *e-Gov* dapat dilihat dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026, dengan penjabaran berupa tersedianya sarana prasarana pengelolaan keamanan informasi, tersedianya sistem data statistik terintegrasi, penguatan fasilitas dan SDM yang prima, perluasan jangkauan layanan hingga skala mikro, serta peningkatan dan pemantapan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi daerah secara bersinergi dengan penerapan standar pelayanan minimum (SPM) pada pelayanan dasar.

Penerapan *e-Gov* di Diskominfoopers sampai saat ini dalam hal kebijakan yang dijadikan landasan secara keseluruhan berjalan lebih baik sebab dalam hal ini mereka sudah turut mengambil andil dalam upaya mengembangkan *Electronic Government*, hal ini dapat dilihat dari adanya keseriusan dalam menjalankan amanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara lebih mendalam dan juga dengan berpegang teguh terhadap Instruksi Presiden terkait pengembangan *e-Gov*. Selain itu terlihat pula bahwa tidak hanya berpegang teguh pada pedoman UU dan Inpres yang telah disebutkan, Diskominfoopers juga berupaya agar kebijakan yang mereka jalankan dapat direalisasikan dalam bentuk Peraturan Daerah, mengingat keberadaan Perda dapat melestarikan penerapan *e-Gov* secara berkelanjutan. Mempertimbangkan hal tersebut tentu saja menjadi sebuah urgensi, mengingat perkembangan teknologi terus menerus bergerak, oleh karena itu dalam hal pemanfaatannya dan penerapannya juga perlu direalisasikan sebab esensi dari *e-Gov* sendiri memiliki makna kemudahan didalam penyampaian dan pelayanan terkait informasi.

3. Data

Data merupakan sesuatu yang didalamnya terkandung sebuah informasi. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan informasi berupa kegiatan yang ada berkaitan dengan jalannya program-program pemerintah daerah dan dipublikasikan oleh diskominfo, tidak hanya di *website* namun juga di media *online* lainnya seperti *facebook* dan *instagram*.

Berdasarkan hasil pendalaman informasi melalui informan juga didapatkan bahwa data yang disajikan dalam bentuk publikasi informasi yang disampaikan secara *online* (daring) melalui *website* yang dibuat atas kerja sama antara Diskominfo dan Pemda Pasangkayu yang didalamnya berisi tentang visi dan misi daerah, data demografi dan program-program serta pencapaian yang dilakukan. Hal tersebut juga telah disiarkan oleh pers dan wartawan yang juga turut meliput sehingga data/informasi yang diterima oleh seluruh masyarakat khususnya dalam lingkup wilayah Kabupaten Pasangkayu lebih terjamin kredibilitasnya. Tidak hanya itu, guna memaksimalkan pelayanan publik *website* juga dilengkapi dengan kolom komentar sehingga sumbang saran dari masyarakat juga bisa disalurkan secara langsung. Selain itu untuk lebih eksis mengikuti perkembangan teknologi secara virtual, kini Diskominfo juga memiliki akun media sosial Instagram, kehadiran akun ini diharapkan dapat menjadi informasi khususnya bagi kaum milenial yang kini lebih banyak mengakses atau menggunakan media sosial ini sehingga informasi yang sama pada *website* dapat lebih tersalurkan. Namun disisi lain perlu adanya kemajuan yaitu membuat agar masing-masing OPD memiliki *website* ataupun yang lebih mudah media sosial secara pribadi, sehingga terkait informasi dapat lebih disaring berdasarkan wewenang atau tanggung jawab yang menjadi tupoksinya. Hal ini akan lebih memudahkan terkait komunikasi antara penerima informasi dan penyedia informasi.

4. Biaya

Aspek biaya yang berhubungan dengan pengembangan *e-Gov* di Diskominfo Pasangayu sampai saat ini terdapat beberapa hal yang sudah direalisasikan sesuai yang telah dianggarkan adalah berupa infrastruktur bangunan telekomunikasi yang berada dalam lingkungan kantor. Selain itu, tersedianya jaringan koneksi internet lokal yang dapat diakses melalui provider yang ada di kabupaten Pasangayu.

Berdasarkan informasi yang ditemukan, pengembangan jaringan dan infrastruktur sejauh ini sudah dilaksanakan dibuktikan dengan adanya beberapa fasilitas seperti perangkat *personal computer* (pc) kemudian adanya kemudahan dalam layanan berbasis teknologi informasi dan beberapa pengembangan dalam infrastruktur dalam bentuk bangunan pusat informasi, juga hal tersebut masih terus diupayakan secara maksimal. Hal lainnya yang dilakukan berupa layanan eksternal yang dimaksimalkan dalam bentuk pengembangan infrastruktur jaringan dengan memanfaatkan sistem jaringan kabel optik, hal tersebut juga sudah berlangsung kurang lebih 4 tahunan dan hampir selesai direalisasikan, tentu hal tersebut merupakan kabar baik karena sehubungan dengan misi dari Diskominfo Pasangayu terkait peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.

Realisasi tersebut merupakan bukti adanya keseriusan dalam pembiayaan berupa penganggaran terkait pengadaan material pendukung teknologi informasi dan komunikasi, secara internal tersedianya perangkat penunjang seperti komputer dalam mendukung pelayanan secara maksimal dan adanya jaringan internet pendukung di dalam ruangan. Hal itu tidak terlepas dari adanya dukungan secara eksternal dengan dianggarkannya dan terealisasi dalam bentuk jaringan kabel optik sebagai penghubung konektivitas secara menyeluruh. Namun dengan adanya kendala lain seperti putusnya sistem jaringan kabel tersebut maka saat ini diperlukan alternatif lain, mempertimbangkan bahwa jaringan kabel tersebut didistribusikan guna pemanfaatan *wifi* publik.

5. Keterampilan

Berhubungan dengan keterampilan terdapat staff yang terampil dalam menjalankan tugasnya di Diskominfo, hal tersebut dibuktikan dengan adanya *website* yang sudah dibuat. Penelusuran lanjutan yang ditemukan bahwa dalam menerapkan *e-Gov*, Diskominfo tidak hanya bergantung pada *website* semata dalam menyampaikan informasi namun juga dengan memanfaatkan media lain seperti aplikasi media sosial Instagram, sehingga hal tersebut dapat dengan mudah dan menjadi daya tarik bagi para kaum milenial saat ini yang lebih banyak mengakses aplikasi ini. Selain itu, beberapa informasi lain yang berusaha dikumpulkan bahwa dalam meningkatkan mutu dan keterampilan bagi para petugas atau staff terlihat adanya keterlibatan mereka dalam beberapa kesempatan berupa kegiatan pendidikan atau BIMTEK yang berhubungan dengan aktivitas penggunaan elektronik dan komunikasi secara langsung pada tempat diadakannya pelatihan tersebut.

Disisi lain, apabila hanya berfokus pada peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini keterampilan namun tidak berbanding lurus dengan peningkatan teknologi secara fisik sebagai pendukung hal tersebut maka hal ini dapat menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena seperti yang telah dijelaskan pada poin terkait Biaya, saat ini yang menjadi fokus adalah pemulihan teknologi terkait penguatan jaringan, yang utama dapat diakses secara gratis oleh publik.

6. Teknologi

Akses jaringan pada wilayah kota memang tergolong stabil, tidak hanya itu juga terdapat berbagai pilihan provider sebagai jaringan komunikasi lokal. Sejauh ini akses terhadap jaringan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat terutama pada wilayah perkotaan Pasangkayu hal ini dapat dirasakan dengan ketersediaannya provider lokal seperti *telkomsel* dan *indosat* sebagai penyedia jaringan untuk koneksi pribadi. Disisi lain pada wilayah perdesaan tidak dapat dipungkiri terkait akses terhadap jaringan lokal masih mengalami kemacetan sebab di beberapa titik terdapat jaringan yang belum tersedia.

Pemerataan terkait akses internet lokal masih dalam tahap pengembangan mengingat distribusi jaringan pada beberapa titik menuju wilayah perkotaan yang adalah desa disekitarnya masih belum tersedia hal ini menjadi sebuah urgensi dan perlu perhatian terkait peningkatan kualitas jaringan apalagi terkait jaringan internet merupakan pintu akses terhadap informasi. Selain itu terkait jaringan publik berupa *wifi* walaupun sudah tersedia pada wilayah perkotaan dapat mengakibatkan ketimpangan karena seharusnya dapat diakses oleh seluruh wilayah kabupaten Pasangkayu, namun untuk sementara hampir seluruh titik di kabupaten Pasangkayu yang terdapat padat permukiman sudah memiliki akses jaringan dengan memanfaatkan provider lokal yang ada seperti Telkomsel dan Indosat. Oleh karena itu untuk saat ini yang dapat menjadi investasi jangka panjang sesuai yang diungkapkan Sharon dapat dilakukan dengan pemerataan terhadap kualitas jaringan internet lokal dengan menjalin dukungan atau kerja sama terhadap pihak provider.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan ditemukan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Realisasi dari *Electronic Government* di Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Pasangkayu masih tengah diupayakan karena mengingat adanya regulasi terkait Inpres nomor 3 tahun 2003 yang menekankan strategi pengembangan *Electronic Government* secara singkat menyebutkan beberapa poin antara lain perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah negara pada tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat, kemudian juga pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang terintegrasi dengan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Hal ini tentu menjadi tantangan sekaligus sebuah kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas.

2. Terkait dengan penerapan atau pelaksanaan *Electronic Government* juga mempertimbangkan teori yang dikemukakan oleh Sharon S. Dawes, adapun hal tersebut menyinggung terkait Strategi, Kebijakan, Data, Biaya, Keterampilan, dan Teknologi yang masing-masing dari teori tersebut realisasinya terus-menerus dimaksimalkan. Strategi yang diterapkan mulai dari sosialisasi terhadap masyarakat hingga memaksimalkan sinergitas antar OPD agar terciptanya *Electronic Government*. Kebijakan yang diambil mengacu pada Inpres hingga turunannya tertuang dalam Renstra (Rencana Strategis) sehingga alur dari Dinas lebih jelas. Data, dalam hal ini bersinggungan dengan informasi yang diberikan maka dapat diakses pada *website* yang telah dibuat. Biaya, Diskominfo memiliki Rencana Strategis yang didalamnya secara eksplisit peruntukannya bertujuan untuk pengembangan mulai dari unsur SDM hingga produk yang menunjang teknologi informasi. Keterampilan, upaya yang dilakukan melalui pelatihan berupa BIMTEK dan edukasi. Teknologi didukung dengan adanya jaringan yang sifatnya publik (*wifi*) dan secara mandiri dengan memanfaatkan jaringan internet.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu khususnya Diskominfo mengenai urgensi dari peningkatan infrastruktur teknologi dan informasi yaitu berupa realisasi dari strategi dan kebijakan yang dibuat. Sehingga terkait data (informasi), biaya (pendanaan), keterampilan, serta teknologi untuk menunjang keberlanjutan dari program *Electronic Government* dapat secara maksimal diterapkan. Utamanya yang menjadi perhatian adalah peningkatan *skill* (keterampilan) bagi *user* (pengguna) dari teknologi yang akan dioperasikan. Serta perlu adanya perhatian tidak hanya Diskominfo, tetapi juga pemerintah daerah maupun bupati yang secara definitif menjabat pada periode ini maupun berikutnya, agar segera menegaskan terkait urgensi dari kebijakan penanganan hingga penerapan *Electronic Government* menjadi sebuah keharusan

untuk diPerbup-kan bahkan hingga diPerda-kan, karena hanya dengan cara inilah sebuah pemerintahan yang berbasis elektronik tidak hanya menjadi angan-angan namun dapat benar-benar diterapkan.

Referensi

- Ali, Edwar. 2012. "Strategi Mengembangkan *E-Government* Untuk Pemerintahan Daerah" 1 (1).
- Anwar, M. Khoirul, dan Asianti Oetoyo S. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah SIMDA*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Revisi 5. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Avison, David E., dan Guy Fitzgerald. 2006. *Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools*. 3rd ed. McGraw-Hill Higher.
- Cahyadi, Adi. 2003. "E-Government: Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan." *The Winners* 4 (1): 1. <https://doi.org/10.21512/tw.v4i1.3796>.
- Dawes, Sharon. 2008. "Introduction to Digital Government Research in Public Policy and Management." Dalam *Digital Government*, disunting oleh Hsinchun Chen, Lawrence Brandt, Valerie Gregg, Roland Traunmüller, Sharon Dawes, Eduard Hovy, Ann Macintosh, dan Catherine A. Larson, 17:103–25. *Integrated Series In Information Systems*. Boston, MA: Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-71611-4_6.
- Habibi, Muhammad. 2018. "Dinamika Perkembangan Model *E-Government*." Preprint. INA-Rxiv. <https://doi.org/10.31227/osf.io/kztm9>.
- Handika, Reza. 2017. "PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG 2017."
- Holmes dan Douglas. 2001. *E Gov: E-Business Strategies for Government*. London: Nicholas Brealey Publishing.
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government: strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. 3 ed. Yogyakarta: Andi.

- — —. 2016. *Electronic Government*.
https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government.
- Lodik, Randy Pebrianto. 2016. "Penerapan *Electronic Government* Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pada Unit Pelaksanaan Teknis Teknologi, Informasi dan Komunikasi Universitas Tadulako studi kasus *website* Universitas Tadulako." Palu: Tadulako.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. SAGE.
- Napitupulu, Darmawan, Muhammad Ridwan Lubis, Erika Revida, Surya Hendra Putra, Syifa Saputra, Jamaludin, Edi Surya Negara, dan Janner Simarmata. 2020. *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *KYBERNOLOGY (ilmu pemerintahan baru)*. Cet.1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugraha, Yenny Martha Diana. 2021. "Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian *Oral Comprehensive* Strata I pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau."
- Nugroho D., Riant. 2006. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta.
- Prafitasari, Ardina, dan Ferida Asih Wiludjeng. 2018. "Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi." *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 4 (2): 31–48. <https://doi.org/10.35457/translitera.v4i2.351>.
- Rahayu, Wiwi. 2013. "Implementasi Kebijakan *Electronic Government* pada Pemerintah Daerah Studi Kasus Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong." Parigi Moutong: Tadulako.
- Safitri, Nurul Wahida. 2016. "PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DI PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KABUPATEN PINRANG."
- Sosiawan, Edwi Arief. 2008. "TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* DI INDONESIA."

- Suaedi, Falih, dan Bintoro Wardianto. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara : Reformasi Birokrasi dan e-Governance*. 1 ed. 351 SUA r. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- — —. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta.
- Tryanti, Witya, dan Aldri Frinaldi. 2019. "EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG" 1 (3).
- Wibawa, Samodra. 2009. *Administrasi Negara: Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wismanu, Rendra Eko, Muhammad Nuh, Nurjati Widodo, dan Nana Abdul Aziz. 2018. "Model Inovasi Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Perizinan dalam Mewujudkan *Smart City* (Studi Pendekatan Sistem Dinamik pada Pemerintah Kabupaten Sragen)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 4 (4): 369–76. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.04.12>.